

Agenda *The Global South* dalam Upaya Reformasi *World Trade Organization* (WTO): Perspektif G20 dan BRICS

The Global South's Agenda for World Trade Organization (WTO) Reform: Perspectives from G20 and BRICS

Saepudin^{1*}, Indrasyifa Chaliq Pratama², Fanesya Audrey³, Caesar Andrea Ari Wibowo⁴
¹²³⁴Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210412146@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Diterima 22 Agustus 2024 | Direvisi 18 September 2024 | Diterbitkan 30 September 2024

ABSTRACT

This article will analyze the global south's agenda in responding to the inability of the World Trade Organization (WTO) to solve contemporary international trade problems. Global South countries unite to ensure that the interests of developing countries are recognized in WTO decision-making. Global south thinking itself offers an alternative in international relations, focusing on economic inequality and north-south relations. Descriptive qualitative research methods with secondary data collection techniques through, books, journal articles, website articles, and previous research are used to analyze the existence of the G20 and BRICS in efforts to reform the WTO. Global South countries such as China, India, and Brazil have actively participated in both institutions to fight for their interests and reduce the gap with the global North. Through WTO reform, they seek to change global governance dominated by the global north, building a new trade architecture based on equality and shared development. This article argues that the presidencies of Indonesia, India, and Brazil in the G20 play an important role in supporting WTO reforms for fairer international trade, and the BRICS also play an important role in providing an alternative platform for the global south amid the global north's hegemony over global trade and economic governance.

Keywords: BRICS, G20, Global South, North-South Relations, WTO Reform

ABSTRAK

Artikel ini akan menganalisis adanya agenda *the global south* dalam merespons ketidakmampuan *World Trade Organization* (WTO) untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan internasional kontemporer. Negara-negara *global south* bersatu untuk memastikan kepentingan negara berkembang diakui dalam setiap pengambilan keputusan WTO. Pemikiran *the global south* sendiri menawarkan alternatif dalam Hubungan Internasional, dengan berfokus pada ketimpangan ekonomi dan relasi antara *north-south*. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui, buku, artikel jurnal, artikel website, dan penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisis adanya G20 dan BRICS dalam upaya mereformasi WTO. Negara-negara *global south* seperti Tiongkok, India, dan Brasil telah berpartisipasi aktif dalam kedua institusi tersebut

untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan mengurangi kesenjangan dengan *global north*. Melalui reformasi WTO, mereka berupaya mengubah tata kelola global yang didominasi *global north*, membangun arsitektur perdagangan baru berdasarkan kesetaraan dan pembangunan bersama. Artikel ini mengemukakan Presidensi Indonesia, India, dan Brasil di G20 memainkan peran penting dalam mendukung reformasi WTO untuk perdagangan internasional yang lebih adil, selain itu BRICS juga memainkan peran penting dalam menyediakan *platform* alternatif bagi *global south* di tengah hegemoni *global north* atas tata kelola perdagangan dan ekonomi global.

Kata kunci: BRICS, G20, Global South, Relasi North-South, Reformasi WTO

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, tantangan dalam perdagangan internasional juga semakin kompleks. Dalam hal ini, kehadiran *World Trade Organization* (WTO) sebagai rezim utama perdagangan internasional sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Ini bertolak belakang dengan kondisi aktual di lapangan, yang mana WTO seringkali dikritik oleh gerakan masyarakat sipil dan negara-negara berkembang (*global south*), karena dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan dan kesetaraan di antara sesama negara anggota. Hal ini kemudian menjadi sebuah fokus perdebatan yang intens, terutama dalam konteks ketidakmampuan WTO untuk secara efektif merespons perubahan-perubahan signifikan dan tantangan perdagangan internasional kontemporer yang meliputi perubahan iklim, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan lain sebagainya.

Pertanyaan mengenai apakah WTO sedang berada pada fase ketidakmampuan tersebut? Atau bahkan lebih jauh dari itu, sedang berada pada titik krisis multilateralisme yang mengancam? Dapat dijawab dengan meninjau tidak efektifnya tiga pilar utama WTO, yang menurut Schneider-Petsinger (2020), meliputi: (i) Penyelesaian sengketa perdagangan; (ii) Perundingan liberalisasi perdagangan yang nantinya akan menyepakati suatu norma dalam perdagangan internasional; dan (iii) Untuk memastikan perdagangan internasional bergulir berdasarkan transparansi dan fleksibilitas, melalui monitoring kebijakan perdagangan pada masing-masing negara anggota.

Saat ini banyak pihak yang meragukan ketiga aspek efektivitas dan relevansi WTO dalam menghadapi tantangan-tantangan perdagangan internasional kontemporer. WTO juga dianggap memihak kepada kepentingan negara-negara maju, sehingga kepentingan serta aspirasi negara-negara berkembang kerap diabaikan. Hal ini termasuk tantangan perdagangan

seperti yang terkait dengan sektor pertambangan, agro industry, dan ekonomi digital. Sebagai contoh dalam sektor pertambangan, sengketa nikel antara Uni Eropa dan Indonesia seringkali dianggap sebagai salah satu hambatan negara berkembang untuk menuju negara maju, karena prinsip perdagangan bebas yang diterapkan oleh WTO (Winanti, 2023).

Kondisi tersebut dapat terlihat dari gugatan Uni Eropa sebagai representasi *global north* atas kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dinyatakan berhasil pada November 2022 melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam putusannya DSB memandang bahwa langkah Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO yaitu pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang pembatasan ekspor. Lebih lanjut WTO juga berpendapat bahwa pembatasan ekspor nikel Indonesia belum mendesak untuk diberlakukan dan kebijakan hilirisasi Indonesia masih dianggap belum matang. Selain itu WTO juga menganggap bijih nikel bukan merupakan produk esensial dan Indonesia tidak sedang mengalami krisis atau kekurangan nikel. Sehingga seharusnya tidak ada alasan yang kuat untuk Indonesia terus memberlakukan kebijakan ini (Martinelli et al., 2023; Winanti, 2023). Di sisi lain, Presiden Joko Widodo tetap bersikeras untuk menghentikan ekspor bijih nikel mentah sebagai bentuk kebijakan hilirisasi di dalam negeri. Indonesia juga memandang bahwa langkah ini sangat strategis untuk *resource nationalism* dimana Indonesia melihat adanya potensi menuju *domestic processing requirement* (Setiani et al., 2024; Winanti, 2023).

Kondisi tersebut setidaknya menggambarkan bagaimana kepentingan nasional negara-negara *global south* sering kali berbenturan dengan komitmennya terhadap rezim dan organisasi internasional, dalam hal ini WTO. Bahkan beberapa pihak menganggap bahwa upaya negara-negara *global south* untuk bertransformasi menjadi negara maju sering kali menghadapi benturan kepentingan dengan dominasi *global north* dengan kepentingan perusahaan multinasionalnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, negara-negara *global south* akhirnya muncul sebagai kekuatan signifikan yang menekankan perlunya reformasi di dalam WTO, untuk menuju sistem yang lebih berkeadilan. Dalam konteks ini, pemikiran *the global south* dalam kajian Hubungan Internasional hadir dan menawarkan mekanisme kerja sama di antara negara-negara *global south* atau *South-South Cooperation* (SSC). Yang mana mekanisme tersebut dianggap penting karena berhubungan erat dengan cita-cita besar mereka untuk membentuk *platform* yang kuat demi mendorong perubahan di dalam WTO atau organisasi internasional

lainnya. Salah satu tujuan utama dari kerja sama yang terjalin tersebut adalah memastikan kepentingan dan aspirasi dari negara-negara berkembang dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pembuatan keputusan di organisasi internasional, dalam hal ini WTO. Saat ini institusi internasional yang dijadikan sebagai *platform* negara-negara *global south* untuk menyalurkan aspirasinya adalah G20 dan tentunya BRICS sebagai entitas yang merepresentasikan esensi dari SSC (Darnal et al., 2023). Lebih lanjut, kedua institusi tersebut memang memberikan ruang keterwakilan dan perwakilan negara-negara *global south* yang cukup memadai.

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, penulis berusaha menjawab pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana aspirasi *global south* dalam agenda reformasi WTO dapat tersalurkan dan diperjuangkan di G20 dan BRICS?”** Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pemikiran *the global south* dalam menganalisis Presidensi G20 Indonesia, India, dan Brasil, sebagai representasi *global south* untuk menyuarakan aspirasi negara-negara selatan terkait reformasi WTO agar lebih berkeadilan. Selain itu, tulisan ini menyoroti BRICS sebagai bentuk SSC dapat berperan menjadi institusi alternatif bagi negara-negara selatan untuk mewujudkan tatanan perdagangan internasional yang menurut mereka lebih berkeadilan.

KERANGKA TEORI

The Global South

Kajian Hubungan Internasional dikenal sangat kental dengan pemikiran Barat atau Euro/Amerika-sentris, hal ini dikarenakan karakter kajian Hubungan Internasional yang memang dibentuk untuk mencegah perang dan konflik melalui tata kelola global yang didominasi oleh *global north* atas *global south*. Sebagai respons dari dominasi pemikiran Barat tersebut, maka muncul teori-teori non-Barat sebagai alternatif yang mulai dikembangkan dan berpusat di Asia, seperti Islam, China, India, dan Jepang (Kristensen, 2021). Di samping itu, beberapa ilmuwan menilai bahwa teori-teori non-Barat ini terlalu menekankan pada orientalisasi karakter non-Barat dan terkesan memiliki perbedaan yang cukup dalam antara satu sama lain (Acharya & Buzan, 2010). Hal ini menimbulkan permasalahan baru terhadap pemikiran non-Barat tersebut, karena dianggap terlalu

mengisolasi diri dari transformasi sosial global yang sedang terjadi, sehingga tidak berfokus untuk mengkritisi dan mempersoalkan krisis relasi kekuasaan yang menghasilkan ketimpangan antara *global north* dan *global south*.

Berdasarkan kondisi ini, muncul inisiatif akademik untuk mereorientasi Hubungan Internasional melalui proyek politik *the global south* di Universitas Gadjah Mada, dengan landasan komitmen akademik dan tujuan politik emansipatoris. Proyek ini berfokus pada kajian Hubungan Internasional berbasis teori kritis dan semangat humanisme dan bertujuan mengubah analisis politik sosial global menjadi upaya nyata untuk merubahnya. Selain itu, istilah *global south* kerap disamakan dengan “dunia ketiga” atau “*periphery*” yang merujuk pada negara-negara dengan ekonomi kurang berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik. Melalui pemikiran ini, negara-negara di kawasan tersebut dapat melakukan upaya kolektif untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, pembangunan wilayah terpinggirkan, serta memperjuangkan kesetaraan dalam organisasi dan rezim internasional. Subjektivitas dan agensi baru yang dihadirkan dalam hal ini berperan penting dalam menciptakan tata kelola global yang lebih adil (Sugiono & Khoiriati, 2021).

Perkembangan pemikiran *the global south* sendiri memiliki keterkaitan dengan kajian pascakolonial (*postcolonial study*). Secara lebih spesifik, *the global south* bermula dari upaya mengkritisi pemikiran dan tata kelola global yang bersifat “*Eurocentris*” dengan menggunakan pengetahuan lokal yang mencakup gagasan dan praktik sosial politik dari interpretasi sejarah dan pengalaman mereka dalam cengkaman kolonialisme, dimana modernitas dan liberalisasi ditinjau ulang, karena kedua hal tersebut dinilai sebagai bentuk kolonialisme gaya baru. Lebih lanjut, kajian *the global south* adalah upaya “dekolonisasi” progresif untuk mendefinisikan ulang makna kemerdekaan bagi negara miskin dan berkembang atas kuasa, pengetahuan, dan tata kelola global yang masih dikuasai oleh *global north* dengan kepentingan kapitalismenya. Hal tersebut didasarkan pada kondisi saat ini, dimana negara-negara *global south* yang secara legal formal telah berhasil bebas dari cengkaman penjajahan Barat (berdiri sama rata sebagai negara yang merdeka dengan negara penjajahnya). Tetapi mayoritas dari mereka masih terperangkap dalam sisa-sisa kolonialisme, terutama dalam bidang sosial, budaya, dan tentunya relasi ekonomi (Mas’oed, 2024; Sugiono & Khoiriati, 2021).

Acharya (2018), berpendapat bahwa praktik Hubungan Internasional Global (Global IR) dapat ditandai dengan adanya pandangan *global south* mengenai tata kelola global (*Global Governance*) serta hubungan antara *global south* dengan *global north* dalam tata kelola global itu sendiri. Lebih lanjut Acharya (2018), juga mengkonseptualisasikan adanya tata kelola global yang multipolar atau “Dunia Multipleks”, yang mana ini dapat menggantikan tatanan hegemonik liberal Barat dan Amerika Serikat atau yang dikenal dengan *The-End-American-World-Order*.

Dalam bidang ekonomi, hal ini ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi baru dunia, seperti China, India, Indonesia, Mexico, Brasil, dan Afrika Selatan. Ini mengakibatkan adanya pergeseran pola perdagangan global, dari yang semula mengarah dari Utara ke Selatan menjadi perdagangan Selatan-Selatan (Atmaja, 2020). Kebangkitan *the global south* juga ditandai dengan bersatunya mereka dengan membentuk blok atau aliansi ekonomi dalam negosiasi-negosiasi perdagangan di *World Trade Organization* (WTO) (Winanti, 2021).

Berangkat dari hal tersebut, *the global south* dapat diartikan sebagai satu gagasan yang bertolak belakang dengan negara-negara maju dengan menekankan pada aspek ketimpangan ekonomi dan relasi yang terus berlanjut antara *north-south* (Winanti, 2021). Konsep *the global south* sangat relevan dalam menganalisis adanya Kerja Sama Selatan-Selatan atau *South-South Cooperation* (SSC) dalam upaya reformasi WTO dari sudut pandang negara-negara dunia ketiga, demi menghasilkan rezim perdagangan internasional WTO yang mampu memberikan solusi relevan dan berkelanjutan untuk masalah perdagangan internasional kontemporer yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pemikiran dan momentum kebangkitan *the global south* untuk menganalisis aspirasi negara-negara Selatan melalui Presidensi Indonesia, India, dan Brasil di G20, terutama terkait reformasi WTO dan peran BRICS sebagai salah satu bentuk SSC. Hal ini menjadi relevan karena *the global south* menyoroti ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta relasi kekuasaan yang masih didominasi *global north*. Di G20, Presidensi Indonesia, India, dan Brasil, berupaya menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang untuk mereformasi WTO agar lebih adil. Selain itu, melalui BRICS negara-negara *global south* yang tergabung dapat memiliki institusi alternatif untuk mendorong kerjasama perdagangan, teknologi, dan investasi guna membentuk tatanan perdagangan internasional yang lebih adil.

METODE PENELITIAN

Artikel yang penulis lakukan kali ini berjudul “Agenda *the Global South* dalam Upaya Reformasi *World Trade Organization* (WTO): Perspektif G20 dan BRICS” dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang mengumpulkan informasi deskriptif, yang meliputi gambaran verbal atau lisan dan sumber tulisan berupa buku, artikel ilmiah, dan berita populer, dari setiap detail yang diamati. Data-data tersebut kemudian digunakan oleh penulis sebagai sumber data sekunder. Data-data tersebut dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Metode ini sendiri, terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti dapat mengeksplorasi interaksi antar-aktor dalam Hubungan Internasional serta menafsirkan proses yang ada di dalamnya. Menurut Kim et al. (2017), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman berlangsung. Metode ini digunakan untuk melakukan kajian yang mendalam dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari kejadian tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian kali ini akan mengidentifikasi secara mendalam dinamika peran G20 dalam mendorong agenda *global south* untuk mereformasi WTO, serta mengidentifikasi pola Kerja Sama Selatan-Selatan dalam hal ini BRICS sebagai alternatif yang muncul di beberapa negara *global south*.

PEMBAHASAN

Sejarah WTO sebagai Tata Kelola Perdagangan Global

Kemunculan tata kelola global dapat ditelusuri kembali setelah Perang Dunia II, yang dimana pada saat itu terdapat pertumbuhan mengenai pemahaman tentang perlunya organisasi internasional yang dapat bekerja secara efektif untuk mencegah konflik di masa depan. Hal ini mengarah pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan keamanan di antara bangsa-bangsa. Namun, muncul kekhawatiran mengenai keterbatasan Piagam PBB, terutama dalam hal menangani

dinamika kekuasaan di antara negara-negara anggota, seperti yang terlihat dalam hak veto yang diberikan kepada lima negara besar di Dewan Keamanan. Bahkan sebelum berdirinya PBB, sudah ada usulan-usulan awal mengenai tata kelola global oleh para pemikir terdahulu, seperti Dante Alighieri, William Penn, dan Charles Castel de Saint-Pierre yang telah mengadvokasi gagasan pemerintahan dunia tunggal atau Konfederasi Eropa untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan antarnegara. Ide-ide ini mencerminkan keprihatinan yang telah lama ada untuk menciptakan sistem yang dapat mengelola hubungan internasional secara efektif dan mencegah konflik (Lopez-Claros et al., 2020).

Tata kelola global sendiri dibentuk dengan mengacu pada tujuan besar seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menyelesaikan permasalahan internasional, melalui berbagai peran, termasuk perumusan kebijakan, penetapan norma, pengembangan kapasitas, resolusi konflik, dan bantuan kemanusiaan (Sinaga et al., 2024). Seiring berjalannya waktu, ada seruan untuk memperkuat PBB dan mengembangkannya menjadi organisasi dunia dengan kekuasaan yang jelas untuk menjaga perdamaian dan mencegah agresi melalui pemberlakuan dan penegakan hukum dunia. Hal ini menyoroti evolusi konsep tata kelola global yang sedang berlangsung, mulai dari proposal filosofis awal hingga upaya praktis untuk meningkatkan kerja sama internasional dan mengatasi tantangan global (Lopez-Claros et al., 2020). Lebih lanjut, evolusi tata kelola global ini mencerminkan pengakuan yang berkembang akan perlunya kerangka kerja internasional yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan global yang mendesak. Dalam praktiknya terjadi pada beberapa badan di bawah PBB, seperti DK PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia.

Dengan terciptanya PBB sebagai pencetus tata kelola global, menjadi penggerak kemunculan berbagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang isu tertentu, salah satunya *World Trade Organization* (WTO) yang muncul karena dipengaruhi oleh konvergensi tiga bidang utama teori dan praktik, yaitu hukum, ekonomi, dan politik. Gagasan bahwa negara-negara berdaulat tetapi dapat memperoleh manfaat dari perjanjian yang mengikat dengan negara lain mengarah pada pengembangan hukum internasional, termasuk pendirian organisasi internasional seperti WTO. Gagasan penting lainnya adalah bahwa negara-negara dapat memperoleh keuntungan bersama dari perdagangan yang lebih bebas, berdasarkan konsep keunggulan komparatif dan skala ekonomi (VanGrasstek, 2013).

WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai transformasi dari GATT. GATT sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, mendorong pertumbuhan pendapatan riil, serta memperluas produksi dan perdagangan. Hingga saat ini setidaknya 164 anggota tergabung sebagai anggota WTO, yang mana mereka mengharapkan adanya keteraturan dalam perdagangan internasional. Sistem perdagangan internasional yang dikelola WTO dengan keanggotaannya yang besar ini menandakan adanya pencapaian luar biasa dalam kerangka hukum perdagangan internasional (Meliala, 2024).

Hal tersebut setidaknya menjadi titik balik legitimasi WTO, dengan peningkatan efisiensi lembaga tersebut dalam skala global. Ini juga memungkinkan bagi WTO untuk memastikan tatanan ekonomi dunia yang lebih liberal bagi negara-negara anggota. Hal ini sangat penting di era globalisasi, dimana terjadi peningkatan kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) di negara-negara anggota. Lebih lanjut VanGrasstek (2013), juga menandai sejarah WTO dengan yudisialisasi penyelesaian sengketa. Dalam hal ini WTO memiliki aturan penyelesaian sengketa yang lebih kuat dibandingkan dengan pendahulunya GATT. Ketentuan ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Tradisi menggunakan penciptaan perdamaian setelah konflik besar untuk memulihkan atau meningkatkan kebebasan komersial berperan dalam pembentukan GATT dan kemudian WTO. Berakhirnya perang dingin juga berkontribusi pada pembentukan WTO sebagai bagian dari “dividen perdamaian”. Perkembangan dasar-dasar hukum, ekonomi, dan politik selama berabad-abad pada akhirnya mengarah pada penciptaan sistem perdagangan multilateral, yang berpuncak pada pendirian GATT dan kemudian WTO. Singkatnya, kemunculan WTO dipengaruhi oleh gagasan kedaulatan, keuntungan bersama dari perdagangan, dan kebutuhan akan sistem perdagangan internasional yang berbasis aturan—perkembangan sejarah, hukum, ekonomi, dan politik internasional memainkan peran penting dalam membentuk fondasi dan evolusi WTO (VanGrasstek, 2013).

Rivalitas *Global South* dan *Global North* di bawah WTO

Rezim perdagangan internasional WTO yang ada saat ini merupakan transformasi dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar *Bretton Woods System* bersama dengan IMF dan Bank Dunia. GATT sendiri pada

mulanya dibentuk dengan semangat *embedded liberalism* atau kompromi antara kebijakan pasar bebas dengan kebijakan kesejahteraan dan pembangunan domestik yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Wolfe, 1999). Melalui putaran Uruguay 1994, GATT akhirnya menginstitutionalisasi diri menjadi organisasi permanen WTO yang mengesampingkan *embedded liberalism* dan mengarusutamakan pasar bebas atau prinsip neoliberal. Sejak saat itu, mulai muncul gerakan masyarakat sipil global yang mengadvokasi hak-hak kaum buruh dan keberlanjutan lingkungan yang mungkin ternodai karena praktik pasar bebas WTO yang mengakomodir kepentingan korporasi global dari *global north* (Winanti, 2006).

John Ikenberry dalam bukunya berjudul *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars* berpendapat bahwa munculnya institusi-institusi global hasil dari *Bretton Woods Consensus* termasuk WTO, bahkan di luar itu ada PBB merupakan salah satu upaya Amerika Serikat sebagai pemimpin *global north* untuk menancapkan hegemoninya melalui rekonstruksi tata kelola global dari sudut pandangnya yang liberal (Rosyidin, 2017). Pendapat ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana posisi dan suara *global south* atau negara berkembang di dalam tata kelola global itu sendiri, padahal secara bersamaan keputusan dalam organisasi atau rezim internasional akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di negara-negara berkembang.

Alden et al. (2010), dalam bukunya yang berjudul *The South in World Politics* memiliki pendapat berbeda, mereka menganggap bahwa *global south* juga memiliki cukup andil dalam peta geopolitik global. Hal ini dapat dilihat dari terlibatnya mereka dalam pembentukan norma internasional melalui negosiasi-negosiasi multilateral, terutama dalam hal prinsip non-intervensi yang berkaitan erat dengan kedaulatan, dan juga dalam hal tata kelola global dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pendapat ini kemudian diperkuat dengan kebangkitan ekonomi *global south* sejak tahun 1990-an. Kebangkitan ekonomi dan peningkatan PDB negara-negara *global south* seperti China, India, Brasil, hingga Malaysia, sedikit banyaknya telah menumbuhkan kepercayaan diri mereka sebagai *emerging power* dan *pivotal state* yang membuat sepak terjangnya mulai diakui pada kancah politik global. Momentum ini kemudian dikapitalisasi untuk menyatukan kekuatan dalam kerangka *South-South Cooperation* (SSC) dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan berdasarkan sistem internasional yang berkeadilan.

Dalam konteks keanggotaan WTO, prinsip pasar bebas ini nyatanya telah diadopsi oleh banyak negara *global south* khususnya di Asia. Hasil dari sistem ekonomi liberal ini kemudian memunculkan fenomena baru berupa *New Industrialized Countries* (NICs), seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Singapura. Keanggotaan *global south* di WTO ini merupakan satu titik balik relasi kuasa antara *global south* dan *global north*. Dengan kata lain, dalam forum-forum negosiasi di WTO, *global north* pasti akan membawa kepentingan kolektifnya untuk mempertahankan status quo, sementara kepentingan kolektif *global south* tetap dengan karakteristiknya yaitu menuntut adanya reformasi mendasar di WTO dan organisasi lainnya seperti DK PBB, IMF, serta Bank Dunia (Rosyidin, 2017).

Stagnansi WTO sebagai Rezim Perdagangan Internasional dan Kegagalannya dalam Merespon Permasalahan Kontemporer

Dalam konteks *global governance*, hukum dan rezim internasional memiliki peran yang tentunya sangat penting, terkhusus dalam mengatur hubungan antarnegara dan menangani tantangan-tantangan global. Lebih lanjut menurut Krasner & Jongryn (2012), efektivitas suatu *global governance* setidaknya harus melibatkan konvergensi tiga aspek, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan gagasan. Adanya krisis hegemoni, kompetisi kepentingan, hingga perbedaan gagasan di dalam *global governance* itu sendiri, dirasa sangat sulit untuk direalisasikannya tiga aspek tersebut ke dalam dinamika politik global saat ini (L. Hakim, 2023).

Mengutip dari naskah pidato pengukuhan Prof. Poppy S. Winanti sebagai Guru Besar Hubungan Internasional UGM (2023), WTO dikatakan tidak sedang baik-baik saja atau bahkan stagnan, dikarenakan tidak adanya anggota *Appellate Body* sebagai organ penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Disusul juga dengan mekanisme negosiasi yang lambat dengan minimnya perjanjian yang disepakati, serta transparansi WTO yang juga sedang bermasalah. Jika difokuskan pada ketiadaan *Appellate Body* akibat boikot Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa rezim perdagangan WTO pincang dan tidak berjalan efektif dalam hal penyelesaian sengketa.

Stagnansi WTO ini juga merujuk pada situasi di mana WTO mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang signifikan dan lambat dalam merespons perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional. Stagnansi ini dipengaruhi oleh perbedaan

pendapat antara anggota WTO, ketegangan perdagangan yang terjadi antara negara-negara besar hingga kompleksitas proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut Narlikar (2020), menyebut WTO kehilangan kredibilitasnya dikarenakan dalam setiap perundingan sering terjadi *deadlock*. Salah satu contohnya yaitu kesulitan dalam menyelesaikan putaran negosiasi perdagangan multilateral yang dikenal dengan *Doha Development Agenda* (DDA). Hal tersebut dikarenakan adanya kemacetan akibat perselisihan yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang mengenai masalah seperti subsidi pertanian, akses pasar untuk produk-produk pertanian serta proporsi penurunan tarif.

Di samping itu, proses pengambilan keputusan di WTO juga memakan waktu yang lama dan sulit. Hal ini karena proses pengambilan keputusan di WTO menerapkan prinsip *single undertaking*, yang mana ini melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang beragam dan memerlukan konsensus dari semua anggota. Pengambilan keputusan yang lama dan stagnasi dalam organisasi ini jelas menghambat kemampuan WTO untuk merespons cepat perubahan perdagangan global kontemporer. Kepincangan dan stagnasi yang dialami WTO ini juga jelas mengindikasikan sistem perdagangan multilateral yang ada saat ini masih menggunakan desain lama, dan kemungkinan sudah tidak relevan dengan kebutuhan perdagangan internasional yang semakin kompleks dan berkembang pesat.

Kritik lain yang juga mempersamai WTO yaitu adanya anggapan bahwa WTO kerap kali berpihak kepada negara-negara maju (*global north*). Pendapat ini didasarkan pada struktur keanggotaan WTO yang mencerminkan kekuatan ekonomi global saat itu, dimana negara-negara maju memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Negara-negara maju juga cenderung memiliki lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi agenda dan hasil negosiasi. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya penerapan peraturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara maju dalam hal akses pasar dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut kondisi ini juga diperparah dengan adanya *gap* kemampuan antara negara-negara maju dan negara berkembang, dalam konteks kapasitas sumber daya untuk terlibat dalam perundingan. Dikarenakan hal tersebut, negara-negara berkembang sering kali mengalami kesulitan dalam menghadapi negosiasi dan penyelesaian sengketa dengan negara-negara maju yang lebih kuat (Howse, 2016).

Kritik lain juga datang dari Amerika Serikat yang merupakan representasi dari *global north*, AS menganggap bahwa WTO kurang mendiferensiasi dalam hal perlakuan terhadap negara-negara anggota. Bahkan AS juga menyimpulkan bahwa ketidakmampuan untuk

membedakan antar anggota (berkembang) menempatkan WTO pada jalur menuju kegagalan negosiasi. Hal ini juga merupakan jalur menuju ketidakrelevanan kelembagaan, dimana WTO tetap terpaku pada masa lalu dan tidak mampu bernegosiasi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini maupun besok (Ismail, 2020). Perlakuan perdagangan ini juga telah menjadi fokus utama dalam pembahasan reformasi WTO. Yang mana negara-negara berkembang sering menekankan perlunya pengakuan terhadap tingkat perkembangan ekonomi dan kebutuhan khusus masing-masing negara dalam proses perdagangan internasional. Akan tetapi, hal ini lagi-lagi sulit dicapai kesepakatannya hingga menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi. Kegagalan ini semakin memperdalam ketidakpuasan terhadap WTO, karena pada prinsipnya diferensiasi yang lebih baik dalam perlakuan perdagangan antara negara-negara anggota merupakan bagian dari upaya untuk mereformasi WTO agar lebih responsif terhadap dinamika perdagangan internasional kontemporer yang sangat penting (Ismail, 2020).

Reformasi WTO dan Agenda *Global South*

Melihat sejarah berdirinya WTO, negara-negara *global south* memiliki andil yang sangat signifikan dalam pembentukan organisasi internasional ini. Melalui Putaran Perundingan Uruguay *global south* dan *global north* berhasil membentuk organisasi perdagangan di bawah rezim WTO. Bersamaan dengan hal tersebut, negara *global south* juga terus memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dengan tergabung dalam “*like minded group*” yang terus berusaha untuk merealisasikan segala macam isu yang gagal direalisasikan dalam putaran Perundingan Uruguay. Dalam perkembangannya negara-negara *global south* terus melanjutkan perjuangannya untuk mengatasi kesenjangan antara *global north*, terutama dalam aspek ekonomi global yang dibatasi oleh *barrier core* dan peri-peri. Lebih lanjut, negara-negara *global south* juga melakukan banyak penetrasi politik dalam agenda-agenda multilateral yang membuka panggung bagi mereka untuk menunjukkan eksistensi *global south* dalam arena internasional serta membuka peluang mereka untuk menyebarluaskan pengaruhnya untuk agenda reformasi WTO (Winanti, 2021).

Keberadaan negara negara *global south* dalam forum- forum global diantaranya adalah konferensi dua tahunan WTO memperlihatkan bagaimana kehadiran negara *global south* sangatlah menunjukkan ofensifitasnya demi mencapai kepentingan mereka dan

mengurangi kesenjangan antara *global south* dan *global north*. Dalam Konferensi ke-13 WTO misalnya, India hadir sebagai representatif *global south* yang terus menyuarakan kepentingan-kepentingan negara *global south* secara ofensif. India dan beberapa negara *global south* menyuarakan kepentingannya terkait putusan-putusan dalam perundangan dua tahunan WTO tersebut. Dalam bidang *e-commerce* misalnya, WTO memutuskan moratorium tarif pada barang digital yang pembahasannya akan diperpanjang hingga konferensi berikutnya dimana agenda ini didukung oleh mayoritas negara *global north*. India dan Afrika Selatan menolak moratorium tersebut karena merasa bagi dunia usaha sangatlah penting untuk menghindari barang digital.

Dalam putusan terkait *Decision Making* juga India sangatlah aktif untuk menentang dan mengevaluasi komitmen berbagai negara *global north* yang dirasa tidak patuh pada putusan putusan WTO yang tidak menguntungkan mereka. Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, mengatakan “tragedi menyedihkan” bahwa beberapa negara besar menghalangi pengaplikasian hasil-hasil yang telah dicapai. Jelas arahnya menyindir negara *global north* seperti Amerika Serikat (WTO, n.d.).

Agenda the *Global South* untuk Mereformasi WTO melalui G20

Terpilihnya Brasil sebagai tuan rumah G20 tahun 2024 ini memperpanjang kepemimpinan *global south* untuk memegang Presidensi G20 selama tiga kali berturut-turut setelah Indonesia dan India. Hal ini juga menunjukkan pada masyarakat global mengenai eksistensi *global south* yang mampu mengimbangi *global north* dalam hal kepemimpinan melalui arena multilateral. Di tengah kondisi geopolitik yang sangat dinamis ini, Brasil mengemban tugas untuk menjaga harmonisasi dan mengurangi kesenjangan antara negara *global north* dan *global south* seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dan India (Wade, 2024).

Pelaksanaan Presidensi G20 Brasil sendiri mengangkat empat isu prioritas, di antaranya: (1) Perdagangan dan pembangunan berkelanjutan; (2) Upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdagangan internasional; (3) Upaya untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam investasi internasional; dan (4) Mendorong reformasi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral (Sayekti, 2024). Dalam agenda reformasi institusi global tersebut, Brasil sebagai Presidensi G-20 akan merangkul

negara-negara *global north* yang pasti di antaranya adalah Amerika Serikat untuk terus melakukan pendekatan bilateral dan multilateral terhadap pemerintahan Biden dalam mendukung reformasi institusi global secara mendasar.

Dalam isu-isu yang diagendakan pada G20 kali ini, Brasil tampil sebagai representatif *global south* dengan memprioritaskan permasalahan pada bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam isu-isu ini, Forum G-20 menjadi bentuk representatif multilateral yang akan menjembatani komunikasi antara negara negara *global south* dan juga *global north*. Dengan ini, Presidensi Brasil di G20 menjadi perpanjangan tangan bagi negara *global south* untuk meningkatkan usahanya dalam mereformasi institusi global agar lebih terlegitimasi dan inklusif dalam segala aspek (Garcia & Ramos, 2024).

G20 di bawah Presidensi Brasil diharapkan untuk mengatasi masalah signifikan terkait dengan reformasi WTO. Ini termasuk meningkatkan peran WTO dalam tata kelola ekonomi global dan memastikannya beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Fernando Pimentel, selaku Direktur Departemen Kebijakan Perdagangan di Kementerian Luar Negeri Brasil, menyoroti pemulihan penuh sistem penyelesaian sengketa di WTO pada akhir tahun 2024. Lebih lanjut, *Trade and Investment Working Group* pada Presidensi G20 Brasil juga menekankan tujuan utama G20 untuk mempromosikan pembangunan, menjamin kemajuan ekonomi dan inklusi sosial, yang mana hal itu baru akan tercapai jika WTO mampu mereformasi diri. Oleh sebab itu, salah satu *guidelines proposal* yang diajukan Brasil terdapat agenda penting reformasi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral. Pada intinya Brasil percaya bahwa G20 di bawah kepemimpinannya dapat menguatkan gagasan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari reformasi WTO yang merupakan panduan prinsip untuk negosiasi. Langkah Brasil ini setidaknya menunjukkan adanya dukungan politik G20 terhadap agenda reformasi WTO yang sedang berlangsung, tentunya ini sejalan dengan semangat emansipatoris *the global south* (Almeida, 2024; G20 Brazil, 2024).

Brasil yang juga merupakan anggota BRICS, kemungkinan akan mengadvokasi reformasi yang mempromosikan praktik perdagangan yang adil dan perwakilan yang seimbang dari negara-negara berkembang dalam WTO, IMF, dan Bank Dunia. Ini sejalan dengan tujuan BRICS yang lebih luas, yaitu untuk mereformasi lembaga-lembaga *bretton woods system* agar lebih mencerminkan lanskap ekonomi global saat ini. Berkaca pada tantangan perdagangan internasional kontemporer yang dihadapi oleh negara-negara

global south, Brasil memiliki urgensi untuk berfokus pada peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang telah menghadapi kritik karena lambat dan tidak efektif. Lebih lanjut, kepemimpinan Brasil juga dapat mendorong proses yang lebih efisien yang menguntungkan semua negara anggota, terutama yang berasal dari negara berkembang.

Pada pokoknya Presidensi Brasil dalam G20 dan keterlibatannya di BRICS ini berpotensi untuk menyoroti dorongan kolektif untuk mereformasi WTO dan lembaga keuangan internasional, yang bertujuan untuk menciptakan lanskap ekonomi global agar lebih adil dan sesuai dengan peta geopolitik global saat ini. Yang mana ini sejalan dengan tema perhelatan G-20 Brasil, yaitu “*Building a Just World and a Sustainable Planet*” dengan beberapa prioritas agenda yang salah satunya adalah reformasi institusi global, di samping isu-isu lain seperti equalitas, mendorong inklusi sosial, memberantas kelaparan, menghambat perubahan iklim, mendorong transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan. Melihat isu yang akan dibahas, tentunya Brasil juga akan membawa kepentingan-kepentingan negara berkembang yang selama ini menghantui mereka (Garcia & Ramos, 2024).

Namun demikian, agar berhasil, pendekatan terhadap AS dan negara *global north* lainnya harus mencakup dukungan terhadap reformasi lembaga-lembaga tata kelola global ini, yang mana dukungan tersebut harus selaras dengan tuntutan negara-negara Selatan dan harus fokus pada reformasi Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional, seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Di satu sisi, Amerika Serikat juga harus mendukung agenda investasi publik global untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di negara-negara Selatan dan melaksanakan komitmen pendanaan iklim. Dalam hal ini, menyelaraskan dan menjembatani kepentingan *global north* dan *global south* menjadi tugas besar bagi Brasil sebagai Presidensi G20 2024 (Garcia & Ramos, 2024).

G20 sebagai arena untuk negara-negara *global south* dalam upaya reformasi WTO, sejatinya bukanlah gerakan baru. Pada KTT G20 2023 di India juga telah menekankan peran G20 untuk memajukan proses negosiasi di WTO terkait sistem penyelesaian sengketa. Lebih lanjut India juga mendorong negara-negara G20 untuk terus mendukung upaya reformasi WTO demi memastikan fungsi WTO yang terbuka, inklusif, dan transparan. Presidensi India juga menginginkan badan penyelesaian sengketa di WTO harus sudah berfungsi secara penuh pada 2024. Dalam Forum (*Trade and Investment Working Group/TIWG*) G20 India, Kementerian Perdagangan Indonesia menekankan WTO harus mendengar aspirasi dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang, dan implementasi *special and*

differential treatment (S&DT) harus terus dikedepankan, mengingat melalui mekanisme ini negara-negara berkembang dapat membangun kapasitas industrinya sambil mengambil manfaat dari perdagangan bebas serta meningkatkan kemampuan untuk mengatasi krisis dan tantangan ekonomi global yang fluktuatif. Melalui pertemuan tingkat Menteri Bidang Perdagangan, Investasi dan Industri (*Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting*), negara-negara anggota G20 menegaskan ulang mengenai pentingnya pematuhan aturan, prinsip nondiskriminatif, adil, terbuka, inklusif, merata, berkelanjutan, dan transparan dalam sistem perdagangan multilateral (Prayudhia, 2023).

G20 di bawah kepemimpinan Indonesia juga berperan penting dalam mendorong diskusi tentang reformasi WTO, dimana negara-negara anggota telah berbagi perspektif dan membangun saling pengertian tentang masalah perdagangan internasional. Lebih lanjut, diskusi-diskusi di G20 Indonesia juga mengadvokasi pendekatan inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang. Melalui *Trade, Investment, and Industry Working Group* (TIIWG) 2022 yang bertema "Pemulihan Ekonomi Kolektif: Menyelaraskan Agenda Perdagangan, Investasi dan Industri dengan SDGs". Indonesia mengusung beberapa agenda prioritas yang salah satunya adalah reformasi WTO dan Kontribusi Sistem Perdagangan Multilateral untuk Pencapaian SDGs. Di saat yang bersamaan Indonesia juga mendorong kesepakatan antar anggota WTO terkait komitmen untuk menyesuaikan aturan perdagangan guna memastikan akses vaksin Covid-19 yang setara. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya kesepakatan di antara negara-negara anggota G20 terkait upaya proses reformasi WTO itu sendiri. Ini menjadi penting bagi Indonesia yang saat itu memegang Presidensi G20 di tengah *recovery* ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Indonesia juga memandang dunia saat ini dihadapkan masalah berat *intersecting crises* yang mencakup kesehatan, perubahan iklim, dan ekonomi, yang mana hal tersebut dapat menghambat agenda besar SDGs. Oleh karena itu, reformasi WTO mendesak untuk dilakukan agar mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan, serta mengembalikan kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral (ARISE+ Indonesia, 2022; Primadhyta, 2022).

Melihat isu reformasi WTO selama masa Presidensi G20 Indonesia dan India pada pokoknya sama-sama menyoroti posisi strategis *global south* dalam negosiasi perdagangan internasional. Kedua negara telah secara aktif terlibat dalam diskusi reformasi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar negara-negara berkembang. Indonesia sendiri telah

memberikan kontribusi dalam diskusi reformasi WTO, dengan mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang, yang di antaranya menyoroti menyoroti isu-isu seperti akses pasar dan S&DT. Dalam hal S&DT, Indonesia menganggap bahwa ini sangat penting untuk praktik perdagangan yang adil. Selanjutnya, Presidensi India telah memperkuat identitas *global south* dalam mempromosikan tatanan dunia multipolar yang berusaha menyeimbangkan dinamika kekuasaan dalam perdagangan internasional.

Berkaca pada hal tersebut, G20 Indonesia dan India berfungsi sebagai *platform* bagi negara-negara berkembang untuk mengkonsolidasikan kepentingan mereka, dengan mengadvokasi kebutuhan negara-negara berkembang yang sering kali terabaikan di WTO. Lebih lanjut, Presidensi G20 Indonesia dan India setidaknya telah menunjukkan harapan untuk meningkatkan posisi tawar *global south* dalam agenda reformasi WTO itu sendiri. Pada akhirnya, tongkat kepemimpinan G20 yang tiga tahun berturut-turut ini dipegang oleh negara-negara *global south* ini akan menghadirkan satu dorongan politik dari perspektif negara berkembang dalam agenda reformasi WTO sebagai rezim perdagangan internasional utama. Dukungan politik ini juga diharapkan akan menghadirkan WTO dengan lebih modern demi kembalinya tiga pilar fungsi WTO sebagai wadah negosiasi, transparansi dan pemantauan, serta penyelesaian sengketa (Prayudhia, 2023; Sayekti, 2024).

Adanya dorongan politik yang kuat dari kedua Presidensi G20 sebelumnya, Brasil sudah seharusnya melakukan hal yang sama atau bahkan memberikan atensi yang lebih. Mengingat agenda reformasi WTO ini sendiri masih berjalan dan belum ada kemajuan yang signifikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di satu sisi negara-negara berkembang dan anggota G20 yang menyumbang 80% PDB dan pemegang 75% perdagangan internasional, membutuhkan reformasi WTO untuk sesegera mungkin (Indah, 2022; Putra, 2022). Jika melihat karakteristik G20 sebagai *platform* multilateral yang lebih efisien dengan melibatkan negara maju dan berkembang, tentunya Brasil harus memastikan gelaran G20 2024 ini mendorong reformasi yang sangat dibutuhkan di WTO, untuk memastikan bahwa WTO tetap relevan sebagai pemain kunci dalam sistem perdagangan internasional dengan mengarusutamakan narasi keadilan dari negara berkembang.

BRICS sebagai Gerakan Alternatif *Global South*

Melihat bagaimana WTO gagal memonitoring sebagian besar keputusannya dalam pengimplementasian di tingkat negara serta adanya sebuah jurang kesenjangan antara negara *global south* dan *global north* yang membuat negara-negara *global south* merasa apa yang menjadi keputusan di dalam rezim tersebut tidak memberikan dampak signifikan untuk perkembangan dan tidak mewakili kepentingan mereka. Sebagai respons akan hal tersebut, negara-negara *global south* membentuk koalisi alternatif untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan mereka selama ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa negara *global south* yang diakui sebagai *leaders* dalam konteks global di antaranya adalah India dan Brasil, dimana mereka kerap kali bersikap ofensif dalam forum-forum WTO ketika keputusan yang diambil dirasa tidak mewakili kepentingan negara *global south*.

Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa negara-negara *global south* menginisiasi pembentukan BRICS yang terdiri dari beberapa negara di antaranya Brasil, India, China, Rusia, dan Afrika Selatan. Melalui *BRICS Statement on Strengthening the Multilateral Trading System and Reforming the WTO (FINAL) (2022)*, BRICS terus menyuarakan reformasi WTO yang dalam prosesnya banyak sekali menguntungkan negara *global north*. Negara-negara BRICS menekankan perlunya penguatan seluruh anggota WTO sebagai sistem perdagangan multilateral berbasis aturan untuk mendukung perdagangan dan perkembangan. Hal ini sangat penting bagi semua anggota WTO untuk menghindari adanya tindakan unilateral dan proteksionis yang bertentangan dengan semangat dan aturan WTO. Hal ini juga digarisbawahi oleh BRICS dengan lebih berfokus pada masalah perdagangan yang termasuk dalam kompetensi WTO.

BRICS yang diwakili beberapa negara yang tergabung dalam G20 juga kerap menyuarakan pentingnya bekerja secara konstruktif mencapai hasil yang berarti sesuai dengan mandat dan memastikan penyelesaian negosiasi mengenai subsidi. BRICS mengakui hal tersebut sebagai hal yang tepat dan efektif dan *special and differential treatment* atau perlakuan yang berbeda adalah alat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi anggota yang sedang berkembang dan harus menjadi satu kesatuan bagian dari negosiasi di WTO (BRICS, 2022).

Dalam sistem perdagangan global WTO yang terkikis, negara-negara BRICS berada pada posisi utama untuk membangun arsitektur perdagangan dan komoditas baru yang didasarkan pada kesetaraan dan jalur pembangunan bersama. Negara-negara BRICS sudah berada pada posisi utama dalam mengembangkan sistem perdagangan, pembayaran dan model pendanaan baru berupa Bank Pembangunan Baru (NDB) yang berperan dalam pembiayaan pembangunan dan sistem pembayaran diantara negara-negara anggota BRICS (Patel, 2024). Selain itu, BRICS juga berkomitmen untuk mempromosikan perdagangan dengan mata uang lokal antar anggotanya, sebagai langkah awal menuju “*de-dollarisation*”. Yang mana langkah merupakan upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Pada akhirnya BRICS sendiri dapat disimpulkan sebagai *platform* alternatif dari negara-negara *global south* untuk menghadirkan tata kelola global dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang lebih berkeadilan. Lebih lanjut BRICS juga menunjukkan adanya model baru tata kelola global dengan menunjukkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi sistem tata kelola global yang sudah ada melalui berbagai inisiatif kelembagaan dan politik (Mangani, 2024). Selain itu, BRICS juga menantang hegemoni AS sebagai pemimpin *global north* melalui restrukturisasi ekonomi dan persatuan diplomatik, dengan tujuan menciptakan tatanan dunia multipolar yang menawarkan alternatif (Dil et al., 2023).

BRICS sendiri dibentuk untuk menekankan potensi kekuatan ekonomi dan pengaruh negara-negara emerging market, dengan maksud untuk menghadapi tantangan bersama, mendorong kerja sama ekonomi, dan memperkuat suara kolektif mereka di tingkat global (Ayres dalam Dil et al., 2023). Tabel berikut menunjukkan bagaimana kekuatan BRICS dapat mengimbangi *global north*.

Tabel 1. BRICS dan Posisinya dalam Ekonomi Global

<ul style="list-style-type: none"> BRICS mencakup lebih dari 25% daratan dunia dan 40% dari populasi global.
<ul style="list-style-type: none"> Semua anggota BRICS merupakan bagian dari kelompok G20, negara-negara ekonomi besar.
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi negara-negara BRICS telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam beberapa dekade terakhir. Empat di antaranya memiliki PDB tahunan melebihi US\$1 triliun.
<ul style="list-style-type: none"> Secara keseluruhan, BRICS memiliki PDB sebesar US\$25,85 triliun pada tahun 2022, sedikit lebih besar dari AS.

<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan PPP, rata-rata PDB per kapita negara BRICS adalah \$17.990, hampir mendekati rata-rata PDB per kapita global (PPP) sebesar \$18.721 pada tahun 2021.
<ul style="list-style-type: none">• BRICS sedang meningkatkan jumlah perdagangan antara negara-negara anggotanya.
<ul style="list-style-type: none">• Negara-negara BRICS telah mengubah sistem politik mereka guna mendukung kapitalisme global.
<ul style="list-style-type: none">• Kerja sama politik antara negara-negara BRICS menciptakan kelompok global baru yang berpotensi besar dan kuat.

Sumber : (Dil et al., 2023)

Tabel tersebut mengindikasikan bagaimana BRICS dengan kekuatannya dapat memainkan peran penting untuk meninjau ulang lanskap global, terutama dalam menanggapi hegemoni AS sebagai pemimpin *global north*, dengan menekankan pada komitmen aliansi untuk membentuk tata kelola global yang multipolar. Inisiatif seperti NDB dan “*de-dollarisation*”. Tentunya dilakukan untuk merestrukturisasi kerangka ekonomi global, yang mana upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat. Melihat semua langkah BRICS tersebut, Melvin (2023), berpendapat bahwa mereka masih jauh untuk menjadi kekuatan penuh yang bisa menyaingi hegemoni negara-negara *global north*. Namun setidaknya BRICS telah berhasil menciptakan *platform* untuk negara-negara berkembang yang menilai institusi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, gagal mengakomodasi kepentingan mereka dan bahkan lambat dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan internasional kontemporer yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Negara-negara *global south*, seperti Indonesia, India, dan Brasil, telah aktif berpartisipasi dalam forum global seperti WTO dan G20, yang mana melalui forum-forum tersebut mereka memperjuangkan kepentingannya dan mengurangi kesenjangan relasi politik dan ekonomi dengan *global north*. Dalam konteks ini, gerakan-gerakan mereka merupakan satu proyek politik *the global south* melalui *South-South Cooperation* (SSC) untuk menciptakan tata kelola global khususnya rezim perdagangan internasional yang lebih adil dan relevan bagi perkembangan zaman. Melalui upaya reformasi WTO ini, negara-negara berkembang ini berusaha untuk mengubah tata kelola global yang didominasi oleh *global north* dan membangun arsitektur perdagangan baru yang didasarkan pada kesetaraan dan

pembangunan bersama. Dengan demikian, gerakan the global south dalam WTO merupakan langkah penting dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang dalam organisasi utama perdagangan internasional tersebut.

Langkah konkret gerakan emansipatoris *the global south* ini dapat dilihat dari Presidensi G20 berturut-turut yang dipegang oleh Indonesia, India, dan kini Brasil. Brasil sebagai representatif *global south*, berfokus pada isu reformasi WTO yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan adil, dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat peran WTO dalam menyelesaikan sengketa dan mengadaptasi tantangan ekonomi global kontemporer. Selain itu, Brasil bersama dengan negara-negara BRICS juga mendorong langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membentuk arsitektur keuangan sendiri. Meskipun BRICS masih jauh dari menyaingi hegemoni negara-negara *global north*, mereka telah berhasil menciptakan *platform* alternatif untuk memperjuangkan kepentingan *global south* dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *The End of American World Order*. In *Polity Press*. Polity Press. <https://doi.org/10.25159/0256-6060/2897>
- Acharya, A., & Buzan, B. (2010). *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond*. Routledge.
- Alden, C., Morphet, S., & Vieira, M. A. (2010). *The South in World Politics*. In *The South in World Politics*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230281196>
- Almeida, D. (2024). *WTO reform among Brazil's priorities at G20*. Gência Brasil. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/internacional/noticia/2024-01/wto-reform-among-brazils-priorities-g20>
- ARISE+ Indonesia. (2022). *Presidensi G20 Indonesia: Mengajak Dunia Memperkuat Kerjasama untuk Mencapai Pemulihan yang Inklusif dan Berkelanjutan*. <https://ariseplus-indonesia.org/id/kegiatan/perspektif/presidensi-g20-indonesia-mengajak-dunia-memperkuat-kerjasama-untuk-mencapai-pemulihan-yang-inklusif-dan-berkelanjutan.html>

- Atmaja, N. N. (2020). Tinjauan Buku Global Production Network : the Theorizing Economic Development in an Interconnected World. *Jurnal Kajian Wilayah*, 11(1). <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i1.847>
- BRICS Statement on Strengthening the Multilateral Trading System and Reforming the WTO (FINAL) (2022).
- Darnal, A., Beri, R., Garcia, A. S., Naidu, S., Sahay, T., & Mohiuddin, M. (2023). *The Future of BRICS: Between Objectives and Challenges*. Stimson Center. <https://www.stimson.org/2023/the-future-of-brics-between-objectives-and-challenges/>
- Dil, S. A., Madutharanga, K. S., Periwita, A. A. B., Rishianto, A., Timur, F. G. C., & Surjaatmadia, S. (2023). Analyzing the Global Dynamics: Brics Navigating Uncertainty and Challenging U.S. Hegemony. *International Journal of Integrative Research*, 1(12). <https://doi.org/10.59890/IJIR.V1I12.1101>
- G20 Brazil 2024. (2024). *SHERPA TRACK: Trade and Investment*. <https://www.g20.org/en/tracks/sherpa-track/trade-and-investment>
- Garcia, A. S., & Ramos, L. C. S. (2024). *Brazil's G-20 Presidency and the Global South*. Stimson Center. <https://www.stimson.org/2024/brazil-g-20-presidency-global-south/>
- Hakim, L. (2023). G20 Sebagai Global Governance: Tantangan Negara-Negara Emerging Economies. In P. S. Winanti & W. Mas'udi (Eds.), *G20 Di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia?* (p. 257). Gadjah Mada University Press.
- Howse, R. (2016). The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary. *European Journal of International Law*, 27(1). <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHW011>
- Indah, R. N. (2022). *Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia*. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>
- Ismail, F. (2020). *WTO reform and the crisis of multilateralism: A Developing Country Perspective*. South Centre.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 40(1). <https://doi.org/10.1002/NUR.21768>
- Krasner, S. D., & Jongryn, M. (2012). Regime Building in the Competitive World Order the Case of The G20. In M. Jongryn (Ed.), *Middle Powers and G20 Governance*. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137350657_4

- Kristensen, P. M. (2021). The South in “Global IR”: Worlding Beyond the “Non-West” in the Case of Brazil. *International Studies Perspectives*, 22(2), 218–239. <https://doi.org/10.1093/ISP/EKZ029>
- Lopez-Claros, A., Dahl, A. L., & Groff, M. (2020). *Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108569293>
- Mangani, D. Y. (2024). BRICS as a Catalyst for Global Governance Transformation: Beyond Western Perceptions. *Vestnik MGIMO-Universiteta*, 17(1). <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2024-1-94-46-64>
- Martinelli, I., Octavo, V. J., & Siregar, A. G. F. (2023). WTO Dispute Settlement Body Ruling on Export Ban of Indonesian Raw Nickel Ore: Private International Law Review. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.57235/AURELIA.V2I2.747>
- Mas’oed, M. (2024). *Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional* (L. Hakim, Ed.). Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada.
- Meliala, A. J. (2024). Mendayung di Antara Dua Karang dalam Dialektika Perdagangan Internasional: Subversi atau Rekonsiliasi? *Padjadjaran Law Review*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1320>
- Melvin, D. N. (2023). *Building Up the BRICS: An Emerging Counter-West Order?* Royal United Services Institute. <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/building-brics-emerging-counter-west-order>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, 2nd ed.* Sage Publications, Inc.
- Narlikar, A. (2020). *Reforming the World Trade Organization*. <https://www.boell.de/en/2020/01/17/reforming-world-trade-organization>
- Patel, A. (2024). *BRICS Plus in Prime Position for a New Trading System as WTO Multilateralism Falts*. Institute For Global Dialogue: Better Africa, Better World. <https://igd.org.za/2024/03/12/brics-plus-in-prime-position-for-a-new-trading-system-as-wto-multilateralism-falts/>
- Prayudhia, M. C. G. (2023). *Indonesia Ajak Anggota G20 Dukung Reformasi WTO*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-ajak-anggota-g20-dukung-reformasi-wto>

- Primadhyta, S. (2022). *RI Utamakan Persamaan Pandangan G20 dalam Reformasi WTO*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220420095520-92-787055/ri-utamakan-persamaan-pandangan-g20-dalam-reformasi-wto>
- Putra, A. H. (2022). *Potential Contributions of the G-20 Presidency of Indonesia to WTO Reform on Dispute Settlement System*. https://www.researchgate.net/publication/359973163_Potential_Contributions_of_the_G-20_Presidency_of_Indonesia_to_WTO_Reform_on_Dispute_Settlement_System
- Rosyidin, M. (2017). The South in World Politics. *Global South Review*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/GLOBALSOUTH.28854>
- Sayekti, I. M. S. (2024). *TIWG Presidensi G20 Brasil 2024, Indonesia Dorong Sistem Perdagangan Multilateral*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tiwg-presidensi-g20-brasil-2024-indonesia-dorong-sistem-perdagangan-multilateral>
- Schneider-Petsinger, M. (2020). *Reforming the World Trade Organization Prospects for transatlantic* (Issue September).
- Setiani, H., Valennia, R., & Rusni, N. K. (2024). Nickel export ban policy in Indonesia - a path to sustainable economic development? *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/ECOPROFIT.V1I2.2024.468>
- Sinaga, O., Erinaldi, E., Swastiwi, A. W., Rosari, R., & Suacana, I. W. G. (2024). The Role of International Organizations in Global Governance: Challenges and Opportunities. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(2). <https://doi.org/10.59613/GLOBAL.V2I2.98>
- Sugiono, M., & Khoiriati, S. D. (2021). Menuju Visi the Global South: Pluralitas Teoretis dan Pluralisme dalam Hubungan Internasional. In L. Hakim, M. Sugiono, & M. Mas' oed (Eds.), *THE GLOBAL SOUTH: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional* (pp. 19–32). Gadjah Mada University Press.
- VanGrasstek, C. (2013). *The History and Future of The World Trade Organization*. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/historyandfuturewto_e.htm
- Winanti, P. S. (2006). WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/JSP.11019>
- Winanti, P. S. (2021). Kebangkitan the Global South dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional. In L. Hakim, M. Sugiono, & M. Mas' oed (Eds.), *The Global South:*

Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional (pp. 51–56). Gadjah Mada University Press.

Winanti, P. S. (2023). *Menimbang Kembali 'Embedded Liberalism' untuk Reformasi WTO: Plurilateralisme dalam Multilateralisme Perdagangan Internasional*.

<https://poppysw.staff.ugm.ac.id/nppgb/>

Wolfe, R. (1999). The World Trade Organization. In Brian. Hocking & S. McGuire (Eds.), *Trade politics : international, domestic, and regional perspectives*. Routledge.

WTO. (n.d.). *Ministerial conferences*. Retrieved May 14, 2024, from

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm